

**PERAN DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM
OPTIMALISASI KETERLIBATAN PRIA PADA UPAYA PENGENDALIAN PENDUDUK
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU**

Ghazy Perkasa Agustian

NPP. 29.0493

*Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: ghazypa@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Based on other problems that occurred in Bengkulu City related to the family planning program in optimizing male involvement in population control efforts, namely the high birth rate in Bengkulu. Bengkulu City, the lack of public awareness regarding population control, and the low participation of men in population control efforts. **Purpose:** This study aims to determine the role of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in the socialization of the family planning program in Bengkulu City, to find out the obstacles to increasing the role of men in the family planning program, and to find out the efforts made by the Dinas P3AP2KB in overcoming the obstacles to increasing the role of men in the program. family planning to control population growth in Bengkulu City. **Method:** The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Methods of data collection is done by observation, interviews, and documentation. **Result:** The results of the study stated that the role of the Dinas P3AP2KB in Optimizing Male Involvement in Population Control Efforts in Bengkulu City had been carried out well but not yet optimal. This is because in its implementation there are still obstacles. **Conclusion:** The obstacle factor is increasing male participation in the Family Planning (KB) program in helping control population growth in Bengkulu City. Efforts made by the Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana in Bengkulu City in overcoming these inhibiting factors are increasing public awareness about the importance of the role of men in family planning programs, increasing socialization and counseling of family planning services, and increasing counseling and increasing access to information and quality. family planning services to optimize population control in the Bengkulu city.

Keywords: Role, P3AP2KB Office, Men, Family Planning Program

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang terjadi di Kota Bengkulu terkait program KB dalam optimalisasi keterlibatan pria pada upaya pengendalian penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di Kota Bengkulu, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengendalian penduduk, dan rendahnya partisipasi pria pada upaya pengendalian penduduk. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam sosialisasi program KB di Kota Bengkulu, mengetahui hambatan peningkatan peran pria dalam program KB, dan mengetahui upaya yang dilakukan Dinas P3AP2KB dalam mengatasi hambatan peningkatan peran pria dalam program keluarga berencana

untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dan mempersiapkan seluruh data, membaca seluruh data yang telah terkumpul dan mulai melakukan analisis dan interpretasi hasil. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas P3AP2KB dalam Optimalisasi Keterlibatan Pria Pada Upaya Pengendalian Penduduk di Kota Bengkulu telah terlaksanan dengan baik namun belum optimal yang disebabkan masih banyak masyarakat belum memahami bahwa program KB dapat membantu dalam pengendalian penduduk. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan. **Kesimpulan:** Faktor hambatan tersebut ialah meningkatkan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana (KB) dalam membantu pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dalam mengatasi faktor penghambat tersebut ialah meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya peran pria dalam program KB, meningkatkan sosialisasi dan konseling pelayanan KB, dan meningkatnya penyuluhan dan meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan KB untuk optimalisasi pengendalian penduduk di kota Bengkulu. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyarankan Dinas P3AP2KB dapat meningkatkan kepedulian dan peran pasangan usia subur (PUS) dalam keikutsertaan program KB agar dapat membantu untuk menekan angka kelahiran dan pengendalian penduduk.

Kata kunci: Peran, Dinas P3AP2KB, Pria, Program Keluarga Berencana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bengkulu adalah Ibu Kota dari Provinsi Bengkulu yang berada di pesisir barat Sumatera. Mengambil data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per bulan Juni 2021, luas wilayah Kota Bengkulu adalah 151,7 km². Jumlah penduduk 374.394 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan dan 67 kelurahan. Jumlah penduduk tersebut tentu akan terus bertambah apabila tidak dilakukan pengendalian pertumbuhan penduduk dan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang akan berpengaruh pada program pembangunan pemerintah. Pertumbuhan penduduk dapat terjadi sesuai dengan pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa seluruh masyarakat berhak melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melalui Otonomi Daerah berhak mengurus dan mengatur terkait urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah wajib yang tidak terkait terhadap pelayanan dasar yang dimaksud dalam pasal 11 Ayat (2) meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, pertanahan, tenaga kerja, pangan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB), perhubungan, usaha kecil, koperasi, dan menengah. Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa pengendalian penduduk dan KB masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pemerintah daerah dapat memiliki tugas untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Dikutip dari artikel bengkulu.bkkbn.go.id (diakses pada tanggal 03 September 2021 pukul 15:19 WITA) Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu Drs. Agus Supardi mengatakan bahwa, “Melihat dari angka kelahiran total tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di Bengkulu disumbang oleh angka kelahiran”.

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mengatakan bahwa usaha dari pemerintah dalam menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah adalah melalui program KB. Dalam hal ini, yang menjalankan program KB di kota Bengkulu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), keberhasilan program keluarga berencana ini sangat bergantung pada peran dari DP3AP2KB tersebut. Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Berdasarkan data dari www.beritasatu.com disebutkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia berada di angka 1,25% dalam kurun waktu 2010-2020 sedangkan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu berada di angka 1,87% pada tahun 2020. Tingginya angka laju penduduk di Kota Bengkulu tersebut disebabkan oleh dua faktor yakni meningkatnya angka kelahiran dan tingginya angka migrasi. Keluarga berencana adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan cara menaikkan usia perkawinan, mengendalikan kelahiran, meningkatkan ketahanan keluarga, meningkatkan keluarga bahagia agar terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas P3AP2KB menjalankan program KB sebagai upaya dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. program KB dilaksanakan pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang berusia produktif pada umumnya 15-49 tahun.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan data BKKBN provinsi Bengkulu dapat diketahui bahwa peran pria dalam KB dinilai masih cukup rendah baik dalam penggunaan kondom atau MOP yakni 4,7% pada tahun 2018, 3,5% pada tahun 2019, dan 3,7% pada tahun 2020 dari total penggunaan metode kontrasepsi pada PUS di Kota Bengkulu. Hal itu disebabkan karena pria merasa bahwa urusan pengendalian anak hanya diberlakukan untuk wanita sehingga pria tidak begitu perlu berkontribusi dalam hal tersebut. Hal ini tentu keliru karena urusan keluarga menjadi tanggung jawab dari pasangan suami dan istri, pasangan suami istri terutama pada PUS harusnya saling bekerja sama dalam melaksanakan program KB agar terwujudnya Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Bengkulu yang tidak terpenuhi kebutuhan KB juga menjadi salah satu hambatan dalam memenuhi program pengendalian penduduk di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu masih banyak PUS yang tidak terpenuhi kebutuhan KBnya yakni 12,55% pada tahun 2019 dan 10,19% pada tahun 2020, hal ini disebabkan kurangnya kepekaan dari masyarakat terhadap program pengendalian penduduk, sehingga perlunya peran dari Dinas P3AP2KB untuk melakukan upaya agar kebutuhan KB masyarakat di Kota Bengkulu dapat terpenuhi. Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa permasalahan lain yang terjadi di Kota Bengkulu terkait program KB dalam optimalisasi keterlibatan pria pada upaya pengendalian penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di Kota Bengkulu, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengendalian penduduk, dan rendahnya partisipasi pria pada upaya pengendalian penduduk.

1.3. Penelitian Terdahulu

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam proses pengendalian pertumbuhan penduduk dengan membuat kebijakan dalam pengendalian kuantitas penduduk dan program KB serta mendistribusikan kebutuhan alat kontrasepsi (Admaja dkk., 2019). Berdasarkan hasil penelitian Atma dapat diketahui pelaksanaan pelayanan program keluarga berencana telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketetapan dan ketentuan dari Peraturan Pemerintah. Namun dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum memenuhi kebutuhan

masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih jelas dan luas (Atma, 2020). Dalam melaksanakan program KB peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan pencapaian program metode kontrasepsi dalam memberikan pengetahuan tentang alat kontrasepsi. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam pengendalian penduduk dengan menyampaikan pentungjan ber KB dan pengetahuan terkait alat kontrasepsi (Melco, 2020). Penelitian Larasati menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang meliputi koordinasi dengan instansi pemerintah, masyarakat umum dan swasta dalam penyelenggaraan KB, memimpin penyuluhan KB, pengenalan alat kontrasepsi dan penanggulangan pasca kontrasepsi (Larasati dkk., 2019). Dalam melaksanakan pengendalian penduduk terdapat beberapa kendala dari internal dan eksternal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti kurangnya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana (Hasriyadi, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni untuk melihat dan mengetahui peran Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu dalam optimalisasi keterlibatan pria pada upaya pengendalian penduduk. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam mendapatkan data peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini tabel perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu dalam optimalisasi keterlibatan pria pada upaya pengendalian penduduk di Kota Bengkulu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan teknik *non-probabilty* sampling dengan *purposive* sampling untuk menentukan informan karena penulis memiliki pertimbangan bahwa informan yang akan penulis tentukan merupakan orang yang penulis anggap paling tahu dalam bidang yang akan penulis fokuskan. Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dikarenakan pada wawancara ini pelaksanaannya lebih bebas dibanding dengan wawancara struktur, tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan masalah dengan lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pandangan dan peikiran mereka. Menurut sugiyono (2017:240) “Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa melalui tulisan, gambar atau karya besar seseorang”. Studi dokumentasi merupakan bagian pelengkap dari pemanfaatan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih valid/dapat dipercaya bila didukung oleh riwayat hidup di masa kecil, disekolah, ditempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Peneliti kali ini akan melaksanakan kegiatan observasi menggunakan metode partisipasi pasif, dimana peneliti tidak perlu terlibat dalam kegiatan namun hanya meneliti di tempat kegiatan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan, mencatat, serta menyimpan data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan serta dapat mendukung proses penelitian tentang Peran Dinas P3AP2KB dalam optimalisasi keterlibatan pria pada upaya pengendalian penduduk di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Dokumen tersebut antara lain dokumentasi wawancara dengan pejabat struktural yang ada di Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu dan masyarakat yang nantinya akan diwawancara, data jumlah peserta KB, data pria partisipasi KB serta dokumen penunjang lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam menganalisis penelitiannya saat di lapangan menggunakan teori menurut ahli Mahsun, pada teori tersebut Mahsun menyatakan indikator untuk mengukur peran dalam organisasi sektor publik, yaitu: *regulity role*, *enabling role*, dan *direct role*. Melalui pengukuran indikator peran dalam organisasi sektor publik menurut Mahsun ini harapannya dapat memberikan manfaat dan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan penulis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang “Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal anak melalui promosi, perlindungan dan pendampingan sesuai dengan hak reproduksi mengatur kehamilan, dan membangun keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bengkulu menyatakan bahwa “Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk mengatur kehamilan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi, pendidikan, penyuluhan Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan partisipasi laki-laki. Dimana implementasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga Undang-undang tersebut menjelaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan reproduksi dalam rangka perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam kependudukan adalah menentukan kebijakan dan program jangka menengah dan panjang pembangunan kependudukan atau keluarga”. Penulis juga mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu beliau menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu berfungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga dan dimana akan ada target untuk pencapaian usia subur dan dimana masyarakat kota Bengkulu masih banyak yang meminati suntik KB dari pada program-program KB lainnya, dalam mewujudkan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, pelaksanaan pelayanan KB. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan dimana akan lebih mengarahkan lagi pembinaan tentang ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Berencana”. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa “Dinas P3AP2KB merupakan perumus untuk kebijakan teknis pada bidang pengendalian penduduk agar terlaksana dengan baik. Bahwa setiap kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga jadi, jika mereka tidak melaksanakan kebijakan ataupun programnya maka mereka akan menerima sanksi dan akan berakibat kepada masyarakatnya yang acuh terhadap program KB (Keluarga Berencana)”.

3.2. Program Keluarga Berencana

Berdasarkan hasil wawancara tentang program Keluarga Berencana menyatakan bahwa “Program Keluarga Berencana Nasional secara umum memiliki andil yang besar dalam mengatur jumlah kelahiran di Indonesia. Fertilitas dapat dicegah dan dikendalikan dengan Program KB sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Program keluarga Berencana Nasional menjadi kebijaksanaan nasional di Indonesia sejak tahun 1968 dan menjadi bagian integral dari rencana pembangunan. Program Keluarga Berencana Nasional ini memiliki target-target Kuantitatif penurunan fertilitas yang diupayakan dicapai dengan menggunakan berbagai strategi, dan dengan adanya program ini, warga masyarakat mempunyai kesempatan lebih luas untuk memperoleh dan

memilih alat-alat kontrasepsi (IUD, pil, sterilisasi dan lain- lain). Partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana khususnya dalam hal penggunaan alat dan obat kontrasepsi sampai saat ini masih didominasi oleh wanita (istri)”. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu menyatakan bahwa “Untuk membantu jalannya program KB dibantu dengan media massa salah satu jenis media yang digunakan beragam mulai dari media sosial dan media lain seperti alat peraga, pamflet, brosur, mural, baliho, dan iklan melalui media televisi. Pada tahun 2021 kami juga membuat inovasi terkait program KB dengan Konsep Korea (Konselor, Pemasangan KB Usia Sebaya), disini kami memberdayakan pemuda generasi berencana untuk diajak memberikan penyuluhan melalui digitalisasi maupun manual kepada Pasangan Usia Subur (PUS) untuk memasang alat kontrasepsi secara gratis melalui Fasilitas Kesehatan di bawah Dinas P3AP2KB”. Penulis juga mewawancarai Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga yang menyatakan bahwa “ Dalam *workshop* KB pria media yang digunakan yakni berupa alat peraga, brosur, pemutaran video. Selain itu kami juga melakukan penyuluhan melalui PL KB di 9 kecamatan bersama kader-kader yang ada untuk menekan angka kelahiran dengan memasang alat kontrasepsi”. Wawancara juga dilakukan dengan Seksi Pembinaan kesertaan Ber-KB yang menyatakan bahwa “Dalam menyampaikan materi penyuluh menggunakan alat peraga untuk memudahkan memeragakan program KB. Pada saat dilakukan konseling pemasangan alat kontrasepsi penyuluh menggunakan media yang membantu calon akseptor untuk memahami alat kontrasepsi. Berdasarkan hasil wawancara mengenai penyampaian program Keluarga Berencana telah terlaksana dengan baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu telah menggunakan beberapa media seperti media elektronik dan media massa pamflet, brosur, baliho, dan KIE Kit yakni suatu unit alat peraga anatomi alat reproduksi, lembar balik, contoh alat kontrasepsi, VCD animasi proses pembuahan dan VCD sosialisasi kontrasepsi. Dalam menyampaikan materi program Keluarga Berencana agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti serta tergerak untuk menjadi akseptor KB terutama KB pria.

3.3. Sosialisasi Program KB

Pelatihan pelaku merupakan metode yang dilakukan dengan memberikan pelatihan terhadap pelaku sosialisasi, dalam hal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu memberikan pelatihan terhadap Penyuluh KB dan motivator KB pria. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu melakukan pelatihan pelaku sebagai upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Masyarakat (KKBPK) dengan cara penumbuhan, pembinaan dan pengembangan Institusi Masyarakat perkotaan/pedesaan (IMP). Pada kegiatan pelatihan pelaku program keluarga berencana bentuk kegiatan pelatihan yang diberikan kepada pelaku sudah terlaksana dengan baik, karena para pelaku sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam menyampaikan materi terhadap masyarakat. Hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Dinas P3AP2KB kota Bengkulu menyatakan bahwa “Para PLKB dan Motivator KB pria diberikan pelatihan berupa pementapan pengetahuan mengenai program KB, cara berinteraksi dan menyampaikan materi kepada masyarakat”. Penulis juga mewawancarai Seksi Pembinaan kesertaan Ber-KB, beliau menyatakan bahwa “Pelatihan yang diberikan kepada PLKB dan Motivator KB Pria untuk dapat paham dan dapat menyampaikan materi Program Keluarga Berencana. Diharapkan dari pelatihan ini dapat membantu pelaksanaan program keluarga berencana agar dapat membantu untuk optimalisasi pengendalian penduduk”. Berdasarkan hasil wawancara dikemukakan bahwa bentuk kegiatan pelatihan pelaku sudah terlaksana dengan baik. Pelaku dalam hal ini penyuluh KB dan motivator KB pria diberikan

pengetahuan mengenai Program Keluarga Berencana, pembelajaran untuk meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada program KB, dan Motivator KB pria yang merupakan akseptor KB pria aktif menjadi testimoni langsung terhadap masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemerintah sebagai instansi pelaksana dan penentu berbagai kebijakan menjadi salah satu komponen penting dalam mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah yang mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku”. Berdasarkan aturan tersebut pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan kebijakan program Keluarga Berencana melalui Dinas P3AP2KB. Dalam pelaksanaannya, Dinas P3AP2KB dibantu oleh instansi pemerintah lainnya. Hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Dinas P3AP2KB kota Bengkulu menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaannya Dinas P3AP2KB dibantu oleh BKKBN Provinsi dan Pusat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPS, Kepolisian, TNI, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW. Dinas Kesehatan sebagai penyedia fasilitas kesehatan (Faskes) yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan Keluarga Berencana, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan, yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta termasuk masyarakat, jejaring Fasilitas Kesehatan KB adalah fasilitas kesehatan KB yang menginduk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Bersalin Desa (Polindes), Praktik Bidan, Praktik Dokter ”. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa peningkatan keterlibatan berbagai institusi pemerintah terkait sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Dinas P3AP2KB dalam melaksanakan tugasnya telah bersinergi dengan instansi pemerintah untuk mendukung peran Dinas P3AP2KB dalam optimalisasi keterlibatan pria pada upaya pengendalian penduduk di kota Bengkulu.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Optimalisasi Keterlibatan Pria Pada Upaya Pengendalian Penduduk di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu telah terlaksana dengan baik namun belum optimal, keterlibatan pria pada program KB memang sudah meningkat dari tahun sebelumnya akan tetapi masih belum memenuhi standar nasional. Kendala yang dihadapi Dinas P3AP2KB dalam optimalisasi keterlibatan pria pada upaya pengendalian penduduk di kota Bengkulu yaitu dalam meningkatkan partisipasi pria pada program Keluarga Berencana (KB) masih banyak masyarakat terutama pria yang kurang peduli dengan program KB, masyarakat masih beranggapan bahwa program KB tersebut hanya dilakukan pada kaum wanita saja padahal pria juga dapat berperan dalam melaksanakan program KB. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Optimalisasi Keterlibatan Pria Pada Upaya Pengendalian Penduduk (P3AP2KB) di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya peran pria dalam program KB, melakukan sosialisasi dan konseling pelayanan KB, melakukan penyuluhan dan meningkatkan akses informasi serta

meningkatkan kualitas pelayanan KB untuk mengoptimalkan pengendalian penduduk di kota Bengkulu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu saat melakukan penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas P3AP2KB secara keseluruhan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama dengan meninjau aspek lain yang mendukung untuk pengendalian penduduk.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas P3AP2KB beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Berry, D. (2009). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bougie, S. d. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2011). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pratama, A. R. (2013). *Optimalisasi Keselamatan Crew Kapal dalam Proses Kerja Jangkar di AHTS Amber*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafindo.
- Soekanto, S. (1987). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winardi. (1996). *Perilaku Organisasi (Organisasi Behaviour)*. Bandung: Tarsito.

B. SKRIPSI/LAPORAN AKHIR

Atma, T. D. (2020). Upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Larasati, I. M. (2020). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. Medan: Universitas Medan Area.

Prasetyo, D. D. (2020). Partisipasi Kaum Pria Dalam Program Keluarga Berencana Untuk Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk di Kota Jambi. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

C. JURNAL

Abdurrahman, d. (2019). Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, (ISSN: 2615-5826).

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu